



Kemendikdasmen
BGTK Lampung



⋮

PENYUSUNAN ⋮

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BGTK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

**#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA**

KEMENDIKDASMEN
RAMAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Lampung Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.



Penyusunan Renstra BGTK Provinsi Lampung Tahun 2025, yang disusun pada tahun 2025 ini memuat visi, misi, kebijakan, tujuan

strategis, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja organisasi dan sekaligus sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi atas kinerja BGTK Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2025-2029.

Penyusunan Renstra BGTK Provinsi Lampung Tahun 2025 ini telah disusun dengan mempertimbangkan prioritas program nasional, kebijakan internal, serta perkembangan kebutuhan para pemangku kepentingan atas layanan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang diberikan BGTK Provinsi Lampung dalam mendukung capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra BGTK Provinsi Lampung Tahun 2025 ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2025-2029. Para pemangku kepentingan dan seluruh warga BGTK Provinsi Lampung, diharapkan dapat memberikan saran dan masukan yang positif sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh BGTK Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, 4 Oktober 2025

Kepala BGTK Provinsi Lampung,


Hendra Apriawan, S.T.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Kondisi Umum	3
1.3. Potensi dan Permasalahan	6
1.3.1 Potensi	7
1.3.2 Permasalahan	8
1.4. Isu Strategis	9
1.4.1 Penguatan Pembelajaran Mendalam (<i>Deep Learning</i>)	9
1.4.2 Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS)	10
1.4.3 Implementasi Kurikulum Nasional	10
1.4.4 Penguatan Komunitas Belajar dan PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan)	11
1.4.5 Optimalisasi Akun Belajar.id dan Digitalisasi Pendidikan	12
1.4.6 Pelatihan Tenaga Kependidikan (Tendik)	12
1.4.7 Penguatan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling (BK)	13
1.4.8 Penguatan Pendidikan Karakter	13
1.4.9 Pengintegrasian Literasi dalam Pembelajaran	14
1.4.10 Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	15
1.4.11 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Internal BGTK	15
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	16
2.1 Visi BGTK Provinsi Lampung	16
2.2 Misi BGTK Provinsi Lampung	16
2.3 Tujuan BGTK Provinsi Lampung	17
2.4 Sasaran Dan Indikator Kinerja Kegiatan BGTK Provinsi Lampung	17
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	19
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi	19
3.2 Kerangka Regulasi	21
3.3 Kerangka Kelembagaan	24
3.4 Reformasi Birokrasi Internal	27
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	30
4.1 Target Kinerja	30
4.2. Kerangka Pendanaan	31
BAB V PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan (GTK) merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan dasar dan menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan serta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Guru dan tenaga kependidikan tidak hanya menjadi pelaksana proses pembelajaran, tetapi juga sebagai penggerak transformasi pendidikan menuju tercapainya delapan dimensi profil lulusan. Oleh karena itu, strategi pengembangan kompetensi GTK harus selaras dengan kebijakan nasional seperti kurikulum nasional, peningkatan mutu kurikulum, dan pemerataan distribusi guru. Dalam konteks tersebut, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Lampung memiliki peran strategis untuk menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program dan kegiatan nyata yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Renstra BGTK Provinsi Lampung disusun sebagai dokumen perencanaan strategis untuk memperkuat arah kebijakan dan program pengembangan GTK di tingkat provinsi. Penyusunan renstra ini menjadi instrumen penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Kemendikdasmen, terutama dalam peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja guru serta tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dengan memperhatikan tantangan pendidikan di Lampung, seperti disparitas kualitas pendidikan antarwilayah, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, serta keterbatasan akses peningkatan kompetensi bagi guru, Renstra BGTK diharapkan mampu menjadi pedoman yang adaptif, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan.

1.2 Kondisi Umum

Pembangunan pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Bagi Provinsi Lampung, pembangunan pendidikan memiliki tantangan tersendiri karena masih terdapat kesenjangan antar wilayah, baik dari sisi mutu pembelajaran, distribusi guru, maupun akses terhadap layanan pendidikan. Hal ini sejalan dengan mandat Kementerian Pendidikan dasar dan menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga

Kependidikan (GTK) serta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru sebagai kunci transformasi pendidikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung pada tahun 2024 tercatat 73,13, meningkat dibanding tahun 2023 (72,48) dengan laju pertumbuhan sebesar 0,90 %. Angka ini menempatkan Lampung dalam kategori “tinggi”, namun masih menjadi provinsi dengan IPM terendah di Sumatera. Komponen IPM menunjukkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 8,36 tahun, sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah 12,78 tahun. Data ini mengindikasikan masih terdapat pekerjaan rumah besar dalam meningkatkan capaian pendidikan masyarakat Lampung, terutama dalam memperluas akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas.

Jumlah guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Lampung 117.804 yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dengan distribusi sebagai berikut:

No	Wilayah	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
1	Kab. Lampung Tengah	1735	8262	3428	1517	1272	41	16255
2	Kota Bandar Lampung	1636	5088	2998	1909	1525	89	13245
3	Kab. Lampung Timur	128	5829	2451	1182	1286	24	10900
4	Kab. Lampung Selatan	964	5399	2215	1133	1144	38	10893
5	Kab. Lampung Utara	752	4557	1661	1028	680	15	8693
6	Kab. Tanggamus	582	4641	1436	650	573	18	7900
7	Kab. Way Kanan	659	3419	1334	729	570	13	6724
8	Kab. Pesawaran	562	3075	1108	534	365	4	5648
9	Kab. Pringsewu	459	2607	1156	657	764	47	5690
10	Kab. Tulang Bawang	521	2839	1201	479	441	7	5488
11	Kab. Tulang Bawang Barat	400	196	971	415	309	21	2312
12	Kab. Lampung Barat	249	1937	999	491	319	0	3995
13	Kota Metro	414	108	770	597	654	67	2610
14	Kab. Pesisir Barat	198	1804	777	289	136	13	3217
15	Kab. Mesuji	393	1512	621	214	274	13	3027
Total	Total	9652	51273	23126	11824	10312	410	106597

Sumber data: Dapodikdasmen per tanggal 04 Oktober 2025

Kondisi pendidikan Lampung tahun 2024 juga memperlihatkan dinamika jumlah sekolah, guru, dan murid di semua kabupaten/kota. Terdapat disparitas yang cukup mencolok antara daerah perkotaan dan perdesaan dalam hal ketersediaan fasilitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik, dan sarana prasarana. Masih ada kabupaten/kota yang menghadapi kekurangan guru di sekolah dasar dan menengah, sementara di wilayah lain terjadi penumpukan guru yang tidak merata. Tantangan lainnya adalah rendahnya

pemanfaatan teknologi pembelajaran di sebagian besar sekolah, khususnya di daerah terpencil, yang berdampak pada mutu pembelajaran.

Indikator	Nilai / Jumlah	Sumber / Catatan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung 2024	73,13	Lampung termasuk provinsi dengan IPM terendah di Pulau Sumatera (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia ≥ 25 tahun	8,36 tahun	Naik dari ~ 8,29 tahun tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
Harapan Lama Sekolah (HLS) usia 7 tahun	12,78 tahun	Data pembentuk IPM Lampung (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Lampung (negeri + swasta)	4.742 sekolah	Dari data BPS Provinsi Lampung tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
Jumlah Guru SD di Lampung	51.273 orang	Dari data Dapodikdasmen Tahun 2025
Jumlah Murid SD di Lampung	711.692 siswa	Data siswa SD menurut BPS Lampung 2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
Jumlah Guru SMP di Lampung	23.126 orang	Rekap guru SMP Provinsi Lampung tahun 2025 (Dapodikdasmen)
Jumlah Guru SMA di Lampung	11.824 orang	Rekap guru SMA Provinsi Lampung tahun 2025 (Dapodikdasmen)
Jumlah Peserta Didik (semua jenjang dasar-menengah)	SD: 627.820; SMP: 333.030	Dari portal data Kemendikdasmen (Data Induk) (Portal Data Kemendikdasmen)

Sejalan dengan hal tersebut, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Lampung memiliki peran penting dalam merespons permasalahan tersebut melalui

program peningkatan kompetensi guru, penguatan profesionalisme tenaga kependidikan, serta pemerataan kualitas layanan pengembangan karir. Data awal dari Neraca Pendidikan Daerah dan rekap guru provinsi menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan BGTK, baik dalam bentuk pelatihan, pendampingan, maupun fasilitasi pengembangan diri guru. Fokus utama adalah memastikan seluruh guru memiliki kompetensi sesuai standar nasional serta mampu beradaptasi dengan tuntutan transformasi digital dalam pembelajaran.

Dengan kondisi tersebut, RENSTRA BGTK Provinsi Lampung 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis untuk mengarahkan kebijakan pengembangan GTK agar selaras dengan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Arah kebijakan akan difokuskan pada penguatan kapasitas guru, pemerataan distribusi tenaga pendidik, serta peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja. Selain itu, RENSTRA ini juga diarahkan untuk mendukung peningkatan IPM Lampung melalui intervensi pada sektor pendidikan, dengan harapan mampu mengangkat kualitas SDM dan daya saing daerah. Dengan langkah yang sistematis, terukur, dan terintegrasi, BGTK Provinsi Lampung diharapkan mampu menjadi motor penggerak peningkatan mutu pendidikan sekaligus akselerator pencapaian visi pembangunan Lampung 2025-2029.

BGTK Provinsi Lampung memiliki 60 Pegawai yang terdiri dari 39 Pegawai ASN dan 21 Pegawai PPNPN yang berperan sebagai pelaksana pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.

1.3 Potensi dan Permasalahan

BGTK Provinsi Lampung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berkedudukan di Provinsi Lampung dan membawahi wilayah kerja 15 kabupaten/kota. Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km², terletak di antara 105°45'–103°48' BT dan 3°45'–6°45' LS. Wilayah ini berbatasan di sebelah barat dengan Samudra Hindia, sebelah timur dengan Laut Jawa, sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan sebelah selatan dengan Selat Sunda. Letak strategis Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatra merupakan potensi besar yang seyogyanya dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya bidang pendidikan.

Sejalan dengan upaya pemenuhan target Rencana Strategis Kemendikdasmen, BGTK Provinsi Lampung memiliki sejumlah potensi yang dapat dioptimalkan. Dari sisi sarana dan prasarana, layanan prima didukung oleh keberadaan gedung perkantoran, ruang aula, ruang kelas, asrama, serta sarana prasarana lainnya. Sejak tahun 2021, pemanfaatan internet juga terus diperkuat, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam Unit Layanan Terpadu (ULT) yang menyediakan layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan. Dari sisi kepercayaan, BGTK Provinsi Lampung telah membangun hubungan kemitraan dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, yang ditunjukkan melalui kerja sama program dan kegiatan lintas wilayah.

1.3.1 Potensi

1. Sarana dan Prasarana yang Menunjang

BGTK Provinsi Lampung telah dilengkapi sarana fisik seperti gedung perkantoran, aula, ruang kelas, asrama, serta sarana pendukung lainnya. Infrastruktur ini semakin diperkuat dengan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk Unit Layanan Terpadu (ULT) untuk layanan informasi, konsultasi, serta pengaduan yang berbasis digital. Hal ini menjadi pondasi untuk meningkatkan kualitas layanan pengembangan guru dan tenaga kependidikan.

2. Kepercayaan Para Pemangku Kepentingan

BGTK Provinsi Lampung memiliki tugas strategis dalam pengembangan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Fungsi pemetaan mutu, pengembangan model peningkatan kompetensi, hingga fasilitasi monitoring dan evaluasi telah menumbuhkan kepercayaan dari pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota. Kepercayaan ini ditunjukkan dengan berbagai kerja sama dan kolaborasi dalam program peningkatan mutu pendidikan.

3. Posisi Strategis Sebagai Pintu Gerbang Sumatera

Secara geografis, Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Pulau Jawa. Hal ini membuka peluang besar bagi BGTK Provinsi Lampung untuk menjadi pusat pengembangan model pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang bisa direplikasi di daerah lain. Dengan letak strategis, mobilitas, dan aksesibilitas yang tinggi, BGTK

Lampung berpotensi menjadi rujukan nasional.

4. Ketersediaan Sumber Daya Guru dan Tenaga Kependidikan yang Besar

Lampung memiliki lebih dari 100 ribu guru dan tenaga kependidikan (data Kemendikbudristek 2021 menunjukkan sekitar 118.000 guru di seluruh jenjang pendidikan). Jumlah ini menjadi potensi besar untuk dikembangkan melalui program peningkatan kompetensi, penguatan literasi-numerasi, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran. Dengan jumlah guru yang besar, BGTK Lampung berpotensi menjadi penggerak utama dalam peningkatan mutu pendidikan di Sumatera bagian selatan.

1.3.2 Permasalahan

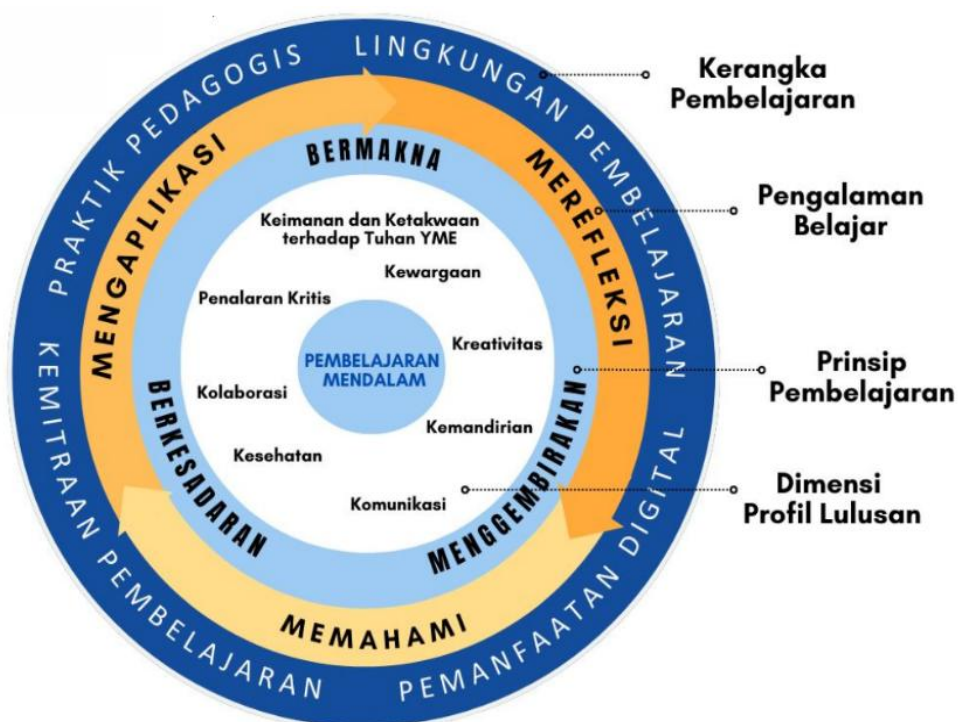
Meskipun memiliki potensi tersebut, BGTK Provinsi Lampung masih menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi melalui penyusunan Renstra 2025–2029.

1. kualitas pengajaran dan pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, kualifikasi minimal guru adalah D4/S1, namun data menunjukkan masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi tersebut: 61,6% guru PAUD, 6,9% guru SD, 4,1% guru SMP, 2,4% guru SMA, 6,8% guru SMK, dan 16% guru SLB. Selain itu, masih banyak guru yang belum tersertifikasi, seperti 97,4% guru PAUD, 65,9% guru SD, 61,5% guru SMP, 58,1% guru SMA, 72,1% guru SMK, dan 69,5% guru SLB (sumber: NPD Provinsi Lampung, 2021). Kondisi ini berdampak pada rendahnya mutu pembelajaran, capaian asesmen nasional, dan efektivitas pengelolaan pembelajaran di sekolah.
2. pengembangan keprofesian guru masih belum optimal. Hasil penelitian internasional menegaskan bahwa pengembangan profesional guru yang efektif bersifat kolaboratif, berfokus pada praktik nyata, dan berlangsung berkesinambungan. Namun, di Lampung sistem pembelajaran guru masih menghadapi hambatan, antara lain belum terbentuknya pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan ekosistem belajar, belum adanya intervensi program pemberdayaan berkelanjutan, serta belum meratanya ekosistem belajar guru di seluruh daerah. Data Uji Kompetensi Guru (UKG) menunjukkan rata-rata nilai di Lampung hanya 53,13, masih di bawah rata-rata nasional baik pada kompetensi profesional maupun pedagogik.

3. tata kelola internal BGTK masih perlu diperkuat. Penguatan sistem manajemen berbasis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi menjadi kebutuhan mendesak agar target kinerja dapat tercapai. Permasalahan yang muncul antara lain masih ada ASN yang belum sepenuhnya memahami tupoksi, belum tersusunnya proses bisnis lembaga secara menyeluruh, serta belum optimalnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Hal ini berimplikasi pada efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dalam pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Lampung.

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Penguatan Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*)



Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang menekankan keterlibatan peserta didik secara aktif, kritis, dan reflektif dalam proses belajar. Tantangan di Provinsi Lampung adalah masih adanya praktik pembelajaran yang bersifat konvensional, kurang inovatif, serta terbatasnya pemanfaatan teknologi pendidikan. BGTK Provinsi Lampung berperan penting dalam memfasilitasi guru agar mampu menerapkan pembelajaran yang tidak hanya menargetkan capaian akademik, tetapi juga membangun kompetensi abad 21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Melalui pelatihan, pendampingan, serta penyediaan modul ajar yang kontekstual, pembelajaran mendalam diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, termasuk di daerah tertinggal dan terpencil.

1.4.2 Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS)

Kepala sekolah memegang peranan strategis dalam menciptakan budaya sekolah yang positif dan meningkatkan mutu pendidikan. Namun, di Provinsi Lampung masih terdapat tantangan terkait kesiapan guru untuk menempati posisi kepala sekolah, terutama dalam aspek kepemimpinan transformasional, manajemen sekolah, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. BGTK Provinsi Lampung melalui program BCKS bertugas menyiapkan calon pemimpin sekolah dengan bekal kompetensi manajerial, supervisi akademik, serta keterampilan membangun jejaring dengan masyarakat dan dunia usaha. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat integritas, etika, dan profesionalisme, sehingga menghasilkan kepala sekolah yang tidak hanya administrator, tetapi juga visioner dalam mengembangkan satuan pendidikan.

1.4.3 Implementasi Kurikulum Nasional



Perubahan kebijakan kurikulum yang menekankan pada fleksibilitas, diferensiasi pembelajaran, dan penguatan karakter menuntut guru di Lampung untuk terus beradaptasi. BGTK Provinsi Lampung memiliki peran sentral dalam mendukung implementasi Kurikulum Nasional melalui pelatihan berkelanjutan, fasilitasi komunitas belajar, serta penguatan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Kendala yang dihadapi adalah masih adanya guru yang kesulitan memahami filosofi kurikulum baru, keterbatasan sarana prasarana di sekolah tertentu, serta kurangnya pendampingan intensif. Dengan strategi penguatan kompetensi guru dan monitoring pelaksanaan kurikulum, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih relevan, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.



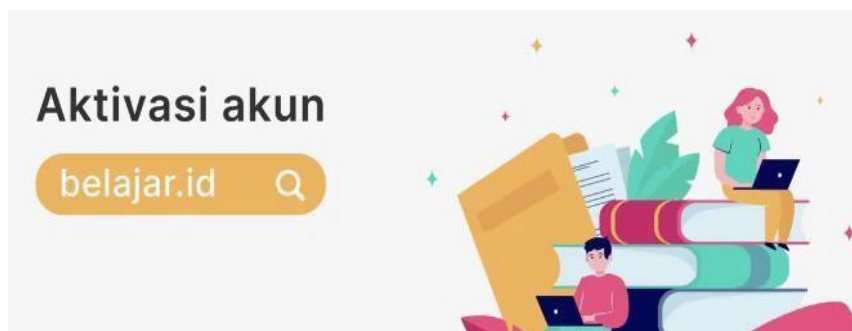
1.4.4 Penguatan Komunitas Belajar dan PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan)



Komunitas belajar merupakan sarana strategis bagi guru untuk berbagi pengalaman, saling memberi masukan, dan mengembangkan praktik baik. Namun, di Lampung partisipasi guru dalam komunitas belajar masih belum merata, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses jaringan internet. BGTK Provinsi Lampung perlu memperkuat peran komunitas belajar dengan memanfaatkan teknologi digital, menghadirkan fasilitator daerah, dan memberikan apresiasi bagi guru yang aktif. PKB juga harus lebih diarahkan pada pemecahan masalah nyata di sekolah, seperti peningkatan literasi, numerasi, dan penguasaan TIK. Dengan penguatan komunitas

belajar, guru dapat lebih mudah melakukan refleksi pembelajaran dan meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan.

1.4.5 Optimalisasi Akun Belajar.id dan Digitalisasi Pendidikan



Pemanfaatan akun Belajar.id menjadi instrumen penting dalam mendorong transformasi digital pendidikan. Namun, belum semua guru dan tenaga kependidikan di Lampung memanfaatkan akun tersebut secara optimal. Hal ini disebabkan oleh tingkat literasi digital yang berbeda-beda, keterbatasan sarana, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan. BGTK Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan akun Belajar.id melalui bimbingan teknis, lokakarya, serta integrasi dengan sistem pembelajaran dan administrasi sekolah. Digitalisasi pendidikan ini diharapkan mampu memperluas akses pembelajaran, meningkatkan efisiensi tata kelola, dan memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah.

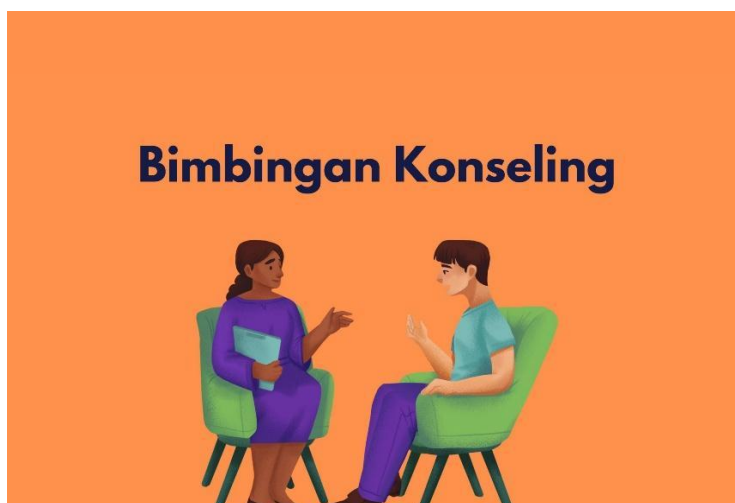
1.4.6 Pelatihan Tenaga Kependidikan (Tendik)



Tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional satuan pendidikan, namun sering kali perannya masih kurang mendapat perhatian. Di Provinsi Lampung, masih terdapat tenaga administrasi sekolah,

tenaga laboratorium, dan tenaga perpustakaan yang belum sepenuhnya mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai tuntutan perkembangan zaman. BGTK Provinsi Lampung akan memperkuat pelatihan dan diklat bagi Tendik dengan menekankan pada keterampilan manajemen administrasi modern, pengelolaan laboratorium berbasis keamanan dan teknologi, serta pengembangan perpustakaan sebagai pusat literasi sekolah. Dengan peningkatan kapasitas Tendik, kualitas layanan pendidikan akan lebih terjamin, dan proses belajar-mengajar dapat berjalan lebih efektif.

1.4.7 Penguatan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling (BK)



Guru BK memiliki peran strategis dalam mendampingi perkembangan peserta didik baik dari aspek akademik, sosial, maupun psikologis. Namun, di Provinsi Lampung tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah guru BK, beban layanan yang tinggi, serta kurangnya pelatihan berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan dinamika masalah remaja masa kini, termasuk isu kesehatan mental, perundungan, dan literasi digital. BGTK Provinsi Lampung perlu memperkuat program pelatihan guru BK yang menitikberatkan pada keterampilan konseling individual maupun kelompok, pemanfaatan teknologi konseling, serta penguatan jejaring dengan lembaga eksternal seperti layanan kesehatan dan perlindungan anak. Dengan penguatan kompetensi guru BK, sekolah dapat lebih optimal dalam membangun lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan ramah anak.

1.4.8 Penguatan Pendidikan Karakter



Pendidikan karakter merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang berintegritas, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berorientasi pada nilai Pancasila. Tantangan yang dihadapi di Lampung adalah masih ditemukannya perilaku intoleransi, perundungan, dan rendahnya budaya disiplin di lingkungan sekolah. BGTK Provinsi Lampung perlu mengintegrasikan pendidikan karakter dalam semua program pelatihan guru dan kepala sekolah, termasuk melalui model pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan ekstrakurikuler yang membangun nilai kebajikan.

1.4.9 Pengintegrasian Literasi dalam Pembelajaran



Rendahnya capaian literasi dan numerasi siswa Lampung dalam asesmen nasional menunjukkan perlunya strategi lebih serius dalam penguatan budaya literasi. BGTK Provinsi Lampung akan mendorong guru untuk mengintegrasikan literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, hingga literasi finansial

dalam proses pembelajaran. Program pendampingan guru juga akan diarahkan untuk memanfaatkan perpustakaan sekolah dan komunitas literasi sebagai pusat pembelajaran.

1.4.10 Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Transformasi digital pendidikan menuntut guru dan pendidik di Lampung untuk memiliki keterampilan dalam memanfaatkan TIK secara efektif. Namun, masih terdapat kesenjangan penguasaan TIK antar guru, terutama di daerah terpencil. BGTK Provinsi Lampung akan mengembangkan program pelatihan guru dalam pemanfaatan *Learning Management System* (LMS), aplikasi pembelajaran interaktif, serta pemanfaatan data digital dalam evaluasi hasil belajar. Dengan optimalisasi TIK, pembelajaran dapat menjadi lebih adaptif, interaktif, dan inklusif.

1.4.11 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Internal BGTK



Sebagai UPT di bawah Kemendikdasmen, BGTK Provinsi Lampung juga harus memastikan tata kelola kelembagaan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tantangan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya pemahaman ASN terhadap tugas pokok dan fungsi, serta perlunya penataan proses bisnis lembaga. Reformasi birokrasi diarahkan untuk meningkatkan kinerja organisasi, membangun budaya kerja profesional, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memastikan layanan publik di bidang pendidikan terlaksana dengan prima.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi BGTK Provinsi Lampung

BGTK Provinsi Lampung sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bidang guru dan tenaga kependidikan mengemban amanat pembangunan sumber daya sehingga visi yang diemban adalah:

“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, BGTK Provinsi Lampung berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan menerapkan tata nilai Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH), serta mengedepankan profesionalitas dan integritas.

Sesuai tugas dan fungsi BGTK Provinsi Lampung menetapkan indikator visi adalah:
2,13% guru dan tenaga kependidikan terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran.

2.2 Misi BGTK Provinsi Lampung

Sesuai tugas dan kewenangannya, BGTK Provinsi Lampung sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah bidang guru dan tenaga kependidikan melaksanakan misi Kementerian dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Adapun misi Kementerian yang menjadi misi BGTK Provinsi Lampung adalah:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.
2. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

Sesuai tugas dan fungsi BGTK Provinsi Lampung menetapkan indikator misi:

1. 2,13 % guru dan tenaga kependidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.
2. 2,13 % guru dan tenaga kependidikan yang dioptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

2.3 Tujuan BGTK Provinsi Lampung

Perumusan tujuan BGTK Provinsi Lampung ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi BGTK Provinsi Lampung sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung ketercapaian tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuan BGTK Provinsi Lampung ditetapkan berdasarkan sasaran program Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Adapun Tujuan dan Indikator Tujuan BGTK Provinsi Lampung:

No	Tujuan BGTK Provinsi Lampung	Indikator Tujuan
1	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan.	2,13% guru dan tenaga kependidikan terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran dari 102.450 GTK di Provinsi Lampung.
2	Menguatnya sistem tata kelola BGTK Provinsi Lampung yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	1. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Lampung sangat baik. 2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Lampung mencapai A.

2.4 Sasaran Dan Indikator Kinerja Kegiatan BGTK Provinsi Lampung

BGTK Provinsi Lampung menetapkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran mengacu pada sasaran program dan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
SK 1 .Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan.	1.1. 2,13 % guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran.
SK 2. Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Lampung.	2.1. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Lampung minimal sangat baik. 2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Lampung minimal A.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden.

Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen yang selaras dengan tugas dan fungsi BGTK Provinsi Lampung merupakan Prioritas Nasional butir 4 (empat) berikut:

Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan untuk mewujudkan penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

Tabel 1 Sasaran Strategis dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Prioritas Nasional 4

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
	Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
1	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan.
2	Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan.
3	Penguatan sistem tata kelola pendidikan.	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan.

Untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dan berkeadilan, arah kebijakan Kemendikdasmen diterjemahkan ke dalam program-program yang selaras dengan Prioritas Nasional 4.

Penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Peningkatan kualitas tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan, mendorong distribusi dan redistribusi berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, penataan jenjang karir, pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi guru dan program afirmasi bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus, selain itu uji kompetensi guru perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan tingkat kompetensi guru sesuai standar kualitas.

- Mendorong pengembangan kurikulum pembelajaran guru yang mencakup penguatan di bidang literasi, numerasi, sains, dan teknologi, pembelajaran mendalam, coding, kecerdasan artifisial, pendidikan karakter, dan kesehatan sekolah.
- Penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan mendorong pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru S1/D-IV.
- Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berbasis *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) dan pendekatan pelatihan berbasis pembelajaran

mendalam.

- d. Peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah untuk mendorong terwujudnya upaya positif dalam perbaikan kualitas belajar mengajar, dan kualitas satuan pendidikan secara menyeluruh.
- e. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
- f. Penyediaan guru dan tenaga pendidik untuk mendukung program sekolah rakyat.
- g. Penguatan pembelajaran kelas rangkap yang terutama dapat diterapkan pada kondisi satuan pendidikan dengan keterbatasan pendidik dan murid, sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas, serta memastikan keberlangsungan pembelajaran di daerah terpencil dengan sumber daya terbatas, dengan mengedepankan ketercapaian pembelajaran berpusat pada anak.

Dari arah kebijakan tersebut yang menjadi arah kebijakan Ditjen GTK PG adalah mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan serta tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah melalui transformasi guru dan tenaga kependidikan.

Arah kebijakan Ditjen GTK PG yang menjadi arah kebijakan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan adalah: Pengembangan Ekosistem Belajar Guru di setiap Provinsi dengan kondisi yang ingin dicapai adalah ekosistem belajar guru dan pendidik lainnya yang berdaya, aktif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif agar dapat membangun sekolah dengan budaya Indonesia yang melekat dan semangat belajar yang kuat bagi seluruh ekosistemnya.

3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikdasmen, beberapa regulasi yang diprioritaskan untuk dilakukan penyesuaian atau perubahan periode tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan BGTK Provinsi Lampung adalah:

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang berlaku, kajian, dan penelitian
1	Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem	1. Integrasi dan harmonisasi regulasi berkaitan dengan pendidikan yang saat ini diatur oleh tiga regulasi utama, yaitu UU

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang berlaku, kajian, dan penelitian
	Pendidikan Nasional.	Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi. Revisi UU Sisdiknas akan menyelaraskan peraturan-peraturan dalam bidang pendidikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. 2. Rancangan sistematika RUU Sisdiknas akan memuat Ketentuan Umum, Pengelolaan Pendidikan, Jalur Pendidikan Formal, Jalur Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
2	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.	1. Mengubah persyaratan dan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kebijakan yang saat ini berjalan mensyaratkan calon kepala sekolah untuk memiliki sertifikat guru penggerak. Syarat tersebut diganti menjadi sertifikat lulus pelatihan bakal calon kepala sekolah. Hal ini perlu mengubah ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. 2. Beberapa muatan yang akan disampaikan dalam peraturan ini antara lain: a. Syarat bakal calon kepala sekolah. b. Penyiapan bakal calon kepala sekolah. c. Mekanisme pelatihan bakal calon kepala sekolah. d. Mekanisme pengangkatan dan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang berlaku, kajian, dan penelitian
		penugasan calon kepala sekolah. e. Mekanisme perpanjangan dan pemberhentian kepala sekolah. f. Tugas dan beban kerja kepala sekolah. g. Pengembangan kompetensi kepala sekolah. h. Penugasan guru sebagai kepala sekolah swasta dan sekolah indonesia di luar negeri. i. Ketentuan lain yang mengatur penugasan guru sebagai kepala sekolah
3	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.	1. Perlu dilakukan perubahan atau revisi sebagai respons terhadap kebijakan pembelajaran mendalam, di mana terdapat perubahan Profil Pelajar Pancasila menjadi profil lulusan. 2. Perlu menyesuaikan regulasi untuk memastikan murid mencapai kompetensi lulusan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, perlu menyusun standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.
4	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12	Revisi terhadap Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang berlaku, kajian, dan penelitian
	Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.	Menengah perlu dilakukan dengan beberapa urgensi di antaranya: 1. Dalam rangka melaksanakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu terkait Pembelajaran Mendalam serta Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial; dan mendukung kebijakan pendidikan bermutu untuk semua.

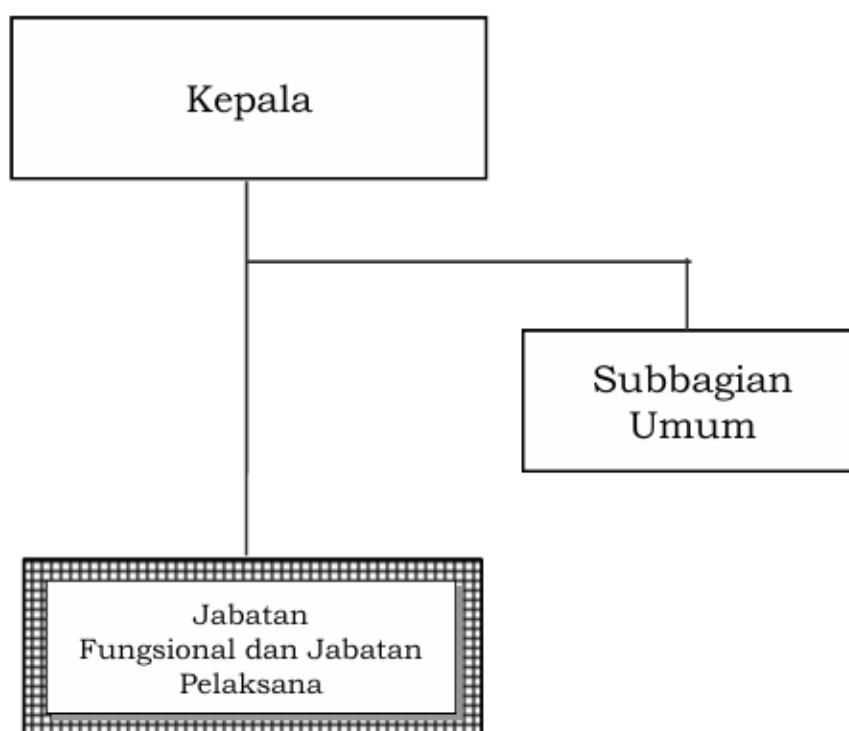
3.3 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Kemendikdasmen, diperlukan kerangka kelembagaan sebagai perangkat organisasi yang melaksanakan tugas untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program Kemendikdasmen. Lebih lanjut dalam Permendikdasmen Nomor 5 Tahun 2025, dijelaskan kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi BGTK Provinsi Lampung sebagai berikut:

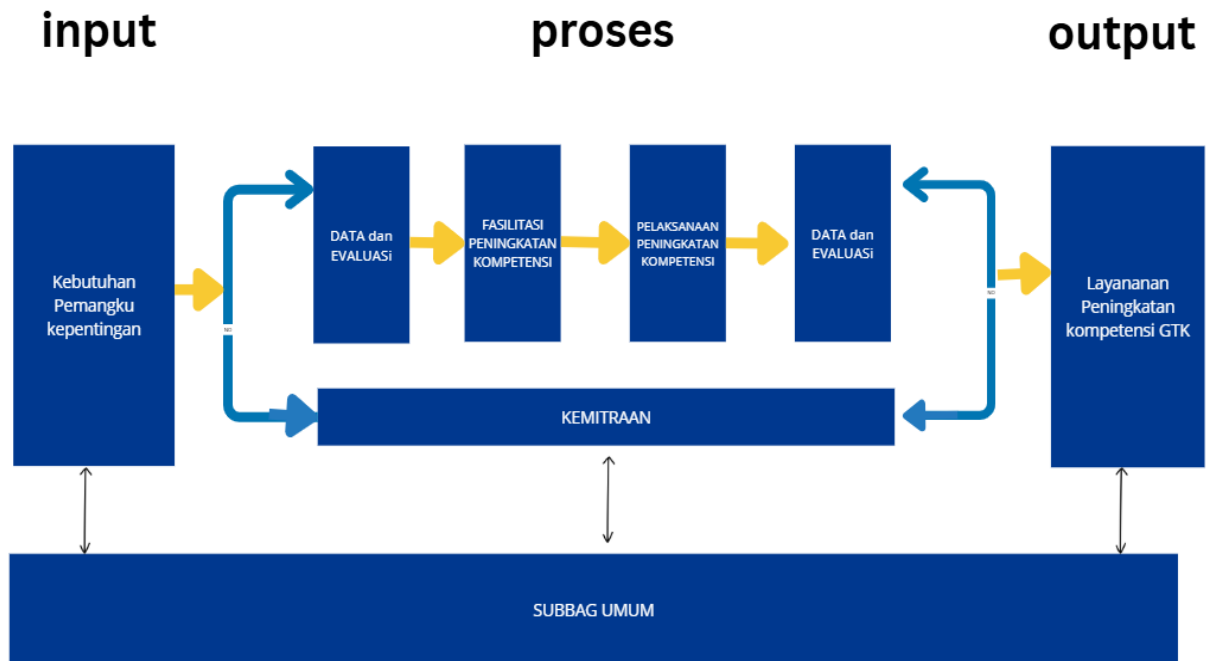
1. BGTK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru.
2. BGTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BGTK menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan model peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
 - c. pengembangan media pembelajaran guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;

- d. pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- f. pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- h. pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi.

Susunan organisasi BGTK Provinsi Lampung sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 adalah:



BGTK Provinsi Lampung dalam periode Renstra 2025-2029 akan menerapkan alur kerja dengan pendekatan sebagai berikut:



Untuk mendukung keterlaksanaan proses bisnis tersebut, disusun tim kerja untuk menjalankan fungsi BGTK sebagaimana berikut;

1) Tim Kerja Data dan Evaluasi

Tim kerja ini akan melaksanakan fungsi:

- pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.

2) Tim Kerja Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

Tim kerja ini akan melaksanakan fungsi:

- pengembangan model peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- pengembangan media pembelajaran guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.

3) Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

Tim kerja ini akan melaksanakan fungsi:

- pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.

4) Tim Kerja Kemitraan

Tim kerja ini akan melaksanakan fungsi:

- pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.

Sedangkan fungsi pelaksanaan urusan administrasi akan dilaksanakan oleh sub bagian umum sebagai sistem pendukung bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BGTK Provinsi Lampung.

3.4 Reformasi Birokrasi Internal

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik dan merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan.



BGTK Provinsi Lampung berupaya melaksanakan reformasi birokrasi internal melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK) sebagai miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi.



Layanan berkualitas dan berintegritas kepada para pengguna layanan BGTK Provinsi Lampung diupayakan melalui perubahan di enam area perubahan dengan target masing-masing area sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

Target yang ingin dicapai adalah:

- a. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai BGTK Provinsi Lampung;
- b. menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- c. terimplementasinya *Core Value* ASN BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif).

2. Penataan Tata Laksana

Target yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; dan
- c. Meningkatnya kinerja BGTK Provinsi Lampung.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Target yang ingin dicapai adalah:

- a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;
- b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
- c. meningkatnya disiplin SDM aparatur;
- d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan
- e. meningkatnya profesionalisme SDM.

4. Penguatan Akuntabilitas

Target yang ingin dicapai adalah:

- a. meningkatnya kinerja BGTK Provinsi Lampung; dan
- b. meningkatnya akuntabilitas BGTK Provinsi Lampung.

5. Penguatan Pengawasan

Target yang ingin dicapai adalah:

- a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- b. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja;
- c. Meningkatkan sistem integritas kerja di BGTK Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan KKN.

6. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Target yang ingin dicapai adalah:

- a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau);
- b. meningkatnya jumlah pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan;
- c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden RI yang diamanahkan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, BGTK Provinsi Lampung menetapkan dua sasaran kegiatan yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan dengan target yang ditetapkan mengacu pada target Renstra Ditjen GTKPG.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
	[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.1] 2,13 % guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	1.45%	1.60%	1.76%	1.93%	2.13%
	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Lampung	2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Lampung minimal sangat baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Lampung minimal A	A	A	A	A	A

4.2. Kerangka Pendanaan

	1.60%	1.76%	1.93%	2.13%
--	-------	-------	-------	-------

Upaya untuk mencapai tujuan BGTK Provinsi Lampung dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber

pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan kegiatan adalah sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi 2025	Alokasi 2026	Alokasi 2027	Alokasi 2028	Alokasi 2029
1.1.1	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran.	4.629.710.000 1.45%	10.487.882.000	12.051.105.000	13.848.811.000	15.916.173.000
1.1.2	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran.	3.864.254.000	55.405.084.000	69.236.343.000	86.591.110.000	108.274.739.000
1.1.3	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah.	11.207.629.000	10.234.113.000	15.430.985.000	18.558.477.000	15.270.104.000
1.1.4	Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi.	4.222.132.000	7.083.460.000	8.151.675.000	9.368.253.000	10.766.531.000
2.1.1	Penyusunan laporan BMN	10.000.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
2.2.1	Layanan Umum	105.715.000	105.715.000	105.715.000	105.715.000	105.715.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang menjadi penjabaran lebih lanjut dari Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Renstra ini disusun untuk periode tahun 2025 - 2029 dengan tujuan mendukung arah kebijakan dan prioritas pembangunan pendidikan nasional.

Renstra ini diharapkan dapat digunakan oleh BGTK Provinsi Lampung sebagai acuan dalam penyusunan rencana tahunan melalui Rencana Kerja (Renja), yang kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Selain itu, Renstra juga berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan evaluasi serta penilaian kinerja atas indikator yang menjadi tanggung jawab BGTK Provinsi Lampung.

Evaluasi pelaksanaan Renstra dilaksanakan setiap akhir tahun dan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) yang memuat capaian serta rekomendasi perbaikan. Monitoring dilakukan secara berkala setiap bulan atau triwulan melalui rapat kerja yang dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan tim kerja, dengan memanfaatkan aplikasi SPASIKITA.

Lebih lanjut, Renstra ini juga diharapkan dapat memenuhi amanat Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan:

1. Rencana Strategis (Renstra);
2. Rencana Kerja (Renja) dan RKA KL;
3. Rencana/Program lintas sektoral bidang pendidikan dan kebudayaan;
4. Laporan Tahunan;
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sejalan dengan dinamika peraturan perundangan, perubahan lingkungan strategis, serta arah kebijakan Kemendikdasmen, Renstra BGTK Provinsi Lampung akan direviu secara berkala dan disempurnakan agar tetap relevan dan terkini. Dengan tersusunnya dokumen Renstra 2025-2029 ini, diharapkan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Lampung dapat mendukung terwujudnya perencanaan berbasis kinerja yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan.